



Minimal Realisasi Anggaran 40 Persen

■ APBD Perubahan Belum Bisa Diajukan
■ BPK RI Sampaikan LHP Riau 2013 Hari Ini

PEKANBARU, TRIBUN - Sesuai hasil konsultasi pimpinan DPRD Riau di Kemendagri, belum lama ini, pembahasan APBD Perubahan tahun 2014 belum bisa dilakukan karena berbagai faktor.

"Pertama, harus ada Laporan Hasil Pertanggungjawaban (LHP) penggunaan anggaran 2013 dari BPKP Riau ke DPRD Riau," kata Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman, Sabtu (7/6).

Selanjutnya, gubernur Riau harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang memuat total jumlah silpa APBD Riau tahun 2013 yang sebelumnya diringi laporan penggunaan APBD murni pada semester pertama tahun 2014.

"Nah jika itu semua sudah lengkap, ditambah lagi serapan anggaran minimal sudah 40 persen. Selanjutnya Pemrov Riau baru bisa mengajukan APBD Perubahan ke DPRD," beber Noviwaldy.

Untuk LHP sendiri, sebut politisi Partai Demokrat ini, BPKP Riau akan menyerahkan ke DPRD Riau pada Senin ini melalui rapat paripurna.

"Jika LHP sudah diserahkan, maka akan jelaslah, apakah Jembatan Siak III dan IV itu ada temuan penyimpangan penggunaan anggaran atau tidak," tutupnya.

Sementara Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap APBD Riau 2013 oleh BPK RI Perwakilan Riau akan diserahkan kepada DPRD Riau, Senin 9/6. Selain kepada DPRD,



TRIBUN/DOK

” Nah jika itu semua sudah lengkap, ditambah lagi serapan anggaran minimal sudah 40 persen. Selanjutnya Pemrov Riau baru bisa mengajukan APBD Perubahan ”

NOVIWALDY JUSMAN
Wakil Ketua DPRD Riau

LHP juga akan diserahkan sekaligus kepada gubernur Riau.

Ketua DPRD Riau, Johar Firdaus akhir pekan kemarin mengatakan, setelah diterima, dewan akan membentuk pansus atas laporan tersebut. Ini dilakukan sebagai tindak lanjut terhadap berbagai temuan yang menjadi catatan BPK.

"Nanti setelah diserahkan akan dibentuk Pansus, atau hanya cukup dibahas pada setiap komisi saja untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK," ujarnya.

Sementara menyangkut status opini dari BPK RI atas LHP Pemrov Riau tahun 2013 itu menurut Johar dia belum mendapatkan informasi hal itu.

Hal senada diungkap oleh Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas BPK RI Perwakilan Riau, Mikael PH Togarotop. Diwawancarai secara terpisah, dia enggan mengemukakan hasil audit sebelum diserahkan kepada DPRD dan Gubri.

"Nanti saja setelah diserahkan kepada DPRD dan Gu-

bernur," ujarnya.

Penyerahan hasil pemeriksaan ini dijadwalkan akan langsung dilakukan oleh Auditor Utama Keuangan Negara V, Bambang Pamungkas dan akan diterima langsung oleh Gubri, Annas Maamun, dan Ketua DPRD Riau, Johar Firdaus. (iam)

Pemprov Target Juli

USAI penyerahan laporan keuangan ke BPK RI Perwakilan Riau pada Senin (9/6) ini, pemprov langsung mengebut upaya pembahasan APBD Perubahan 2014. Pada Senin siang dewan akan menggelar paripurna laporan pertanggungjawaban APBD 2013.

Pada kesempatan itu, akan ada pembahasan bersama DPRD Riau guna menetapkan silpa penggunaan anggaran 2014 yang akan dimasukkan ke dalam APBD-Perubahan.

"Tanggal 9 ini laporan penyampaian ke BPK tentang laporan keuangan 2013. Siangnya disampaikan laporan pertanggungjawaban APBD. Nanti dibahas bersama DPRD lalu ditetapkan silpa penggunaan anggaran untuk digunakan pada APBD Perubahan," kata Asisten III Setdaprov Riau, Hardy Jamaluddin, Sabtu (7/6).

Dijelaskannya, setelah adanya penetapan berapa silpa APBD, diharapkan pula Juli rancangan APBDP sudah dapat disahkan. Terkait proses pembahasan APBDP saat ini, Hardy belum bersedia merincikannya.

Namun begitu, sesuai dengan ketentuan dari Permendagri, proses pembahasan dan pengesahan APBD P paling lambat sudah disahkan sebelum September. "Pemprov secara teknis sudah membahas. Yang jelas saat ini APBD P masih proses," terang Hardy. (uha)